

9-30-2016

Ijtihad Islamisme Turki ala Erbakan

Arya Sandhiyudha

Madani Center for Development and International Studies, arya.endonesya@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Political Science Commons](#)

Recommended Citation

Sandhiyudha, Arya (2016) "Ijtihad Islamisme Turki ala Erbakan," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 1, Article 6.

DOI: 10.7454/jp.v2i1.1131

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss1/6>

This Book Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Politik* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

R E S E N S I

Ijtihad Islamisme Turki ala Erbakan

ARYA SANDHIYUDHA*

Madani Center for Development and International Studies

Email: arya.endonesya@gmail.com

Hidayat, Syahrul. 2015. *Mengislamkan Negara Sekuler: Partai Refah, Militer, dan Politik Elektoral di Turki*. Jakarta: Prenada Media. 240 halaman.

Tidak banyak yang membedah secara khusus sosok Necmettin Erbakan setelah tahun 2002 AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi), yang pertama kali didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan, menjadi fenomena dan memenangkan Pemilu. Terlebih penulis di Indonesia, baru Syahrul Hidayat yang menuliskannya yang mengulas secara khusus suatu tema khusus mengenai apa yang penulis istilahkan dengan “ijtihad Islamisme Turki”.

Dalam kajian Turki era AKP hingga kini, setidaknya ada enam *cluster* tematik yang termasyhur. Pertama, mereka yang mengangkat Islamisme pasca-Erbakan, yaitu era Erdogan dan AKP seperti diteorikan oleh Alam (2009), atau perbandingan transisi antara akhir era Erbakan dan awal era Erdogan, seperti diungkap West II (2005). Kedua, ulasan anatomi militer, relasi sipil-militer, agenda keamanan nasional, dan rezim negara, seperti tulisan Altınay (2004), Bilgin (2008), Kadioglu (2010), dan Karabelias (2008). Ketiga, kajian peran media dan pendidikan untuk rekayasa membangun titik pandang dan wacana Kemalisme demi tuntutan stabilitas rezim, baik melalui proses demokrasi maupun transisi ekstrim seperti kudeta, seperti dituliskan Balci (2010), Balkir *et.al.* (2008), Dursun (2006), Gülalp (2005), Carkoglu dan Hale (2008), Ozman (2010), Wuthrich (2010). Keempat, studi mengenai faktor ideologi dan pragmatisme dalam partai politik, pilihan politik, pembelahan sosial dan transformasi negara, diantaranya dibahas oleh Baskan (2005), Çarkoğlu (2008), Göl (2009), Kalaycioğlu (2008), Koğacioğlu (2004), Sayari dan Hasanov (2008). Kelima, elaborasi sintesa

Turkisme, Islamisme, modernitas, demokrasi, liberalisme ekonomi-politik, dan globalisasi seperti dianalisa Keyman dan Koyuncu (2005), Kosebalaban (2007), Kuru (2007; 2013), Mardin (2005), Onar (2007), Öniş dan Türem (2002), Yavuz dan Esposito (2003), dan Yilmaz (2002, 2005, 2011, 2012). Keenam, mendedah konstitusionalisme dalam sejarah Turki Utsmani ataupun era Republik, seperti uraian penulis Köker (2010), dan Ülker (2005).

Oleh karenanya, kesuksesan Syahrul Hidayat mempublikasikan buku ‚Mengislamkan Negara Sekuler: Partai Refah, Militer dan Politik Elektoral di Turki‘ layak diapresiasi publik karena keunikan temanya. Penulis merayakan hal itu dengan menghadirkan tanggapan bahwa betapa ‚mahal‘ buku tersebut. Pada intinya “benang merah” dari catatan ini menunjukkan urgensi buku ini sebagai latar sejarah dan konteks yang utuh yang menjadi tahapan sebelum kelahiran Turki era AKP (Altınay, 2004).

Catatan pertama yakni karya ini mengurai fenomena yang tidak banyak penulis lain jelaskan, yakni fakta empiris bahwa Islamisme di Turki, baik Erdoğan ataupun Erbakan sama-sama menerima dan mendukung prinsip sekularisme Turki. Meski demikian, terdapat perbedaan interpretasi dan objektifikasi yang oleh buku ini dibantu dengan menjelaskan bagaimana posisi Erbakan. Dalam versi AKP yang didirikan Erdoğan, Gül dan Arınç di kemudian hari, Erbakan dinilai terlalu kaku dalam membawa gagasan dan identitas Islam dalam politik (untuk kondisi sebaliknya lihat juga Aminuddin dan Ramadlan 2015). Dimensi pembaharuan pemikiran dan praktik AKP tersebut tidak dapat dipahami, kecuali dengan memahami Erbakan dan konteks politik Turki yang keras, ketika ketidaksetiaan terhadap prinsip sekularisme dapat disalahpahami hingga mengundang dicekalnya izin berpolitik (Kuru, 2013; Kosebalaban, 2007; Göl, 2009).

Catatan kedua yakni bahwa Erbakan dan Refah-nya secara kolektif lebih memiliki warna untuk ‘meminta’ dan ‘merawat’ anggotanya untuk lebih dekat ke Islam. Terutama sekali apabila dibandingkan dengan praktik Islamisme AKP yang didasari pandangan yang mengapresiasi kebebasan sipil individu atau sekularisme pasif, bahwa secara individu-

al, anggota partai boleh religius juga boleh tidak religius atau bahkan ateis. Sekali lagi, ini semua perlu dipahami dalam konteks sosio-politik Turki, bahwa jangankan partai yang berasaskan Islam, Refah yang resminya bukan Islam tapi berusaha membawa ide-ide Islam dalam rumusan 'modern' pun akhirnya dilarang berpolitik. AKP pun belum pernah menerapkan kebijakan yang monumental terkait minuman keras, kecuali pengurangan atau pembatasan alkohol yang tetap sama dengan logika di Eropa yakni atas alasan tidak baik bagi kesehatan dan mengganggu ketentraman jika mabuk. Islamisme Turki telah menjadi fenomena baru bahwa motif (*niyat*) individu tidak boleh dibelenggu, termasuk sikap politik yang didasari motif menjalankan *da'wah* atau *syari'at Islam*. Namun cara pandang ini juga melihat bahwa Islam harus dijelaskan kepada publik dengan logika dan bahasa rasional atau sekuler bukan dengan dalil agama (Alam 2009; Yilmaz, 2011, Platzdasch, 2009).

Catatan ketiga, kudeta putih 1997 terhadap Necmettin Erbakan dan krisis ekonomi 2001 sangatlah memengaruhi lahirnya AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) dengan narasi "Keadilan dan Pembangunan" dalam Transformasi Islamisme Turki. Buku ini menjelaskan bagaimana Islamisme Refah yang masih sangat kental dengan nuansa Islamis, baik retorika (*speech act*), politik domestik maupun politik luar negeri seperti pembentukan D8, yaitu fora untuk 8 negara mayoritas muslim. Refah (sebagaimana MNP dan MSP) yang dipimpin Erbakan secara kolektif 'meminta' dan 'merawat' anggotanya untuk lebih dekat ke Islam. Buku ini akan membantu pemahaman akan perbedaannya dengan Islamisme AKP yang membatasi alkohol dengan bahasa bukan syariat Islam, namun dengan logika yang sama dengan pembatasan alkohol di Eropa, tidak baik untuk kesehatan dan mengganggu ketentraman jika mabuk. Kepengurusan dan anggota AKP ada yang religius, ada yang sekuler, ada yang nasionalis, namun mereka duduk bersama dalam satu forum, sementara Refah tidak demikian (Sakallioğlu, 1997).

Catatan keempat, transformasi Islamisme Turki tidak terpisahkan dari transformasi neoliberal Turki. Namun, transformasi Turki tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor seperti krisis hegemoni AS (*macro-*

space), gerakan sosial politik (*meso-space*), dan karir politik Turgut Ozal (*micro-space*) yang, tidak seperti dugaan pada umumnya, dampak terutama transformasi ini bukanlah memperkuat *bourgeoisie* (borjuase) industrialis Istanbul atau kelas kapitalis saja. Namun, hal itu juga berupa penataan ulang hegemoni terhadap masyarakat sipil (*civil society*) yang memberi ruang penetrasi baru sehingga terjadilah perubahan kepentingan dari hegemon global terhadap kawasan.

Artinya, dekade Ozal (1980-1989/1993) dan reformasi Neoliberal Turki adalah akibat dari geopolitik dan perkembangan sosial saat itu, sehingga secara unik ia berkontribusi bagi tiga hal, yaitu:

1. Pertumbuhan segmen borjuasi baru dari kalangan nasionalis yang punya kedekatan dengan gerakan Islam;
2. Terciptanya pelipatgandaan masyarakat kelas menengah; dan
3. Redistribusi kesejahteraan pada kelas menengah-bawah sebagai akomodasi atas kemarahan massal (Karabelias, 2008).

Peran borjuasi Islam dalam kesuksesan Islam Populis Turki hari ini tidak tiba-tiba terjadi. Lihatlah bagaimana di era Turgut Ozal dan bahkan sejak era Partai Demokrat tahun 1950-60an kesempatan kelas menengah Islam bertumbuh begitu terbuka sehingga Milli Goruş yang dipimpin Necmettin Erbakan sejak tahun 1970-an hingga tahun 1997 dapat memaksimalkannya, sekaligus menjadi basis kekuatan bagi AKP generasi pembaharuan yang dipimpin Erdoğan.

Oleh karena itulah, kasus Turki menghasilkan sesuatu yang paradoks dari gejala reformasi Neoliberal pada umumnya, yakni: kesenjangan kesejahteraan justru berkurang! Memahami situasi reformasi Neoliberal era Ozal akan membantu pemahaman terhadap „kesuksesan“ Islamis-Erbakan menjadi Perdana Menteri ataupun era Erdoğan sejak 2002 hingga kini (Mardin, 1989).

Catatan kelima, transisi Neoliberal Turki menjadi unik sebab krisis hegemoni di dua level, yaitu makro dan meso. Di satu sisi, upaya aliansi politik domestik Turki mempertahankan hubungan dengan AS (yang merosot hegemoninya) masih berlangsung. Di sisi lain, gerakan yang semarak di akhir 1970-an seperti sayap ekstrim kanan, Islam radikal, dan

neo-fasis mengalami penguatan struktural sehingga mempengaruhi suasana anti AS. Faktor bertahannya hegemoni AS lebih karena faktor eksternal seperti Revolusi Iran 1979, persaingan dengan Uni Sovyet, dan NATO (Park, 2005).

Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 menjadi saksi keberpihakan Turki terhadap AS. Kehadiran Menlu Turki, Fatin Rüştü Zorlu di KAA sangat jelas untuk meyakinkan agar negara peserta konferensi berlabuh pada haluan AS-Barat sehingga tahun 1945-1970-an bisa dipastikan tidak ada pertentangan berarti antara kebijakan strategis Turki dengan AS.

Catatan keenam, profil politik Erbakan sebagai pemimpin Turki sudah ditempa sejak menjadi pemimpin gerakan mahasiswa. Salah satu momen penting level domestik yakni 4 Desember 1945 ketika sekitar 20 ribu mahasiswa Islamis dan nasionalis Turanis terlibat mendirikan surat kabar, penerbitan, dan percetakan buku menyerukan „kematian komunis“, „hancurlah Rusia“, aksi politik yang dikenal dengan Tan Incident ketika Ozal terlibat bersama Süleyman Demirel dan Necmettin Erbakan (Karabelias, 2008).

Catatan ketujuh sikap politik luar negeri Turki era Erbakan mempertahankan apa yang sejak dahulu yang sudah solid, begitupun politik luar negeri era selanjutnya (Erdogan). Pembelaan demokratisasi Mesir dapat ditelusuri sebabnya dari akar sejarah Turki. Istilah kudeta telah menjadi momok-negatif yang bagi masyarakat Turki, karena pengalamannya mengalami empat kali kudeta dalam setengah abad. Kudeta-kudeta tersebut terjadi pada tahun 1960-61 terhadap PM Adnan Menderes dari Partai Demokrat, tahun 1971-73 terhadap PM Suleyman Demirel bersamaan prosesnya *Milli Nizam Partisi* (MNP)-nya Erbakan ditutup, tahun 1980-83 terhadap PM Suleyman Demirel yang juga berdampak pada pelarangan Erbakan dan *Milli Selamet Partisi* (MSP), dan “kudeta putih” di tahun 1997 terhadap Necmettin Erbakan sekaligus penutupan terhadap *Refah Partisi* (RP). Maka, ketika Mesir menghadapi *coup d’etat* (kudeta) yang secara harfiah berarti “pukulan yang merobohkan (negara/ pemerintah)”, baik pemerintah ataupun masyarakat sangat menentang ide kudeta terhadap pemerintahan sipil demokratis.

Catatan kedelapan yaitu gerakan Islam terpopuler di Turki saat ini, yaitu Milli Gorus yang merupakan gerakan yang digagas oleh Necmettin Erbakan. Gerakan ini menolak ide upaya memasukkan Turki ke dalam keanggotaan Uni Eropa dengan argumen bahwa Turki lebih dekat kepada negara-negara Islam dan Uni Eropa merupakan “Klub Kristen” (*Christian Club*). Pemimpin gerakan ini, Erbakan, selama tiga dekade menolak ide Turki sebagai anggota Uni Eropa. Dalam prosesnya memang gerakan Milli Gorus telah mengalami transformasi dari relijius kanan ke tengah untuk merangkul kelas menengah borjuis Anatolia, para muslim ‘abangan’, rakyat miskin, dan juga suku Kurdi yang berbeda mazhab hingga kemudian ia menggabungkan Osmanisme, Nasionalisme, Modernisme, dan Islamisme (Cinar dan Arikian 2002; Karpat, 2001).

Milli Gorus, kini setelah meninggalnya Erbakan, tidak kehilangan ruh untuk terus bergerak. Gorus dikenal oleh publik dunia ketika terdapat tragedi penyerangan tentara *Israel Defense Forces* (IDF) yang menyerang Mavi Marmara, kapal yang digunakan untuk mengirim bantuan ke Palestina dalam pelayaran kemanusiaan yang dibawa oleh relawan kemanusiaan lintas-negara.

Catatan kesembilan adalah atas dasar sejarah dan basis ideologis terdapat tantangan soliditas. Ancaman distabilitas politik keamanan jelas terbuka ketika pemerintah dihadapkan dukungan akar rumput yang terbelah. Misalnya, para aktivis IHH, salah satu yayasan kemanusiaan terbesar berhaluan Islamis, mengalami pembelahan sikap. Sebagiannya kecewa dengan keputusan yang diambil pemerintah AKP Turki, dan memperingatkan secara keras akan *track record* Israel yang tidak bisa dipercaya. IHH, sebagai perwajahan Milli Gorus yang dulu didirikan Necmettin Erbakan, pesimis normalisasi hubungan Turki-Israel berusia lama, dan Gaza berpotensi untuk kembali dibombardir Israel. Meskipun, Israel sudah dilihat oleh pemerintah Turki menyetujui tiga prasyarat Turki dengan kompensasi jaminan Turki atas ancaman keamanan mereka di kawasan. Juga sebab Turki mau bekerjasama menyalurkan gas Israel ke Eropa, ini diantara yang paling menguntungkan

mereka di tengah penurunan drastik situasi ekonomi domestik Israel (Karabelias, 2008).

Sembilan catatan ini semoga dapat menjadi penguat ataupun tambahan pengetahuan mengenai sosok Erbakan dan kontribusi besarnya bagi “Transformasi Islamisme Turki” yang telah diulas oleh penulis dalam bukunya. Tahniah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Anwar. 2009. “Islam and Post-Modernism: Locating the Rise of Islamism in Turkey.” *Journal of Islamic Studies* 20 (No.3): 352-375.
- Altınay, Ayşe Gül. 2004. *The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey*. London: Palgrave Macmillan.
- Aminuddin, M. Faishal dan Moh. Fajar Shodiq Ramadhan. 2015. „*Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009.*“ *Jurnal Politik* 1 (No.1): 39-74.
- Balci, Ali. 2010. “A Trajectory of Competing Narratives: The Turkish Media Debate Ergenekon.” *Mediterranean Quarterly* 21 (No. 1): 76-100.
- Balkir, Canan, Susan Banducci, Didem Soyaltin, dan Huriye Toker. 2008. “Expecting the Unforeseeable: The 2007 Turkish Elections in the Media.” *Turkish Studies* 9 (No.2): 199-214.
- Baskan, Filiz. 2005. “At the Crossroads of Ideological Divides: Cooperation between Leftist and Ultrationalists in Turkey.” *Turkish Studies* 6 (No.1): 55-69.
- Bilgin, Pinar. 2008. “Thinking Past ‘Western’ IR?” *Third World Quarterly* 29 (No. 1): 5-23.
- Çarkoğlu, Ali. 2008. “Ideology or Economic Pragmatism? Profiling Turkish Voters in 2007.” *Turkish Studies* 9 (No.2), 317-344.
- Cinar, Alev dan Burak Arıkan. 2002. “The Nationalist Action Party: Representing the State, the Nation or the Nationalists?” *Turkish Studies* 3 (No.1): 25-40.

- Dursun, Ciler. 2002. "The Struggle Goes On: The Discursive Strategies of the Islamist Press in Turkey." *Journal of Contemporary European Studies* 14 (No.2): 161-182.
- Göl, Ayla. 2009. "The Identity of Turkey: Muslim and Secular." *Third World Quarterly* 30 (No.4): 795-811.
- Gülalp, Haldun. 2005. "Enlightenment by Fiat: Secularization and Democracy in Turkey." *Middle Eastern Studies* 41 (No.3): 351-372.
- Çarkoğlu, Ali dan William Hale (Eds.). 2008. *The Politics of Modern Turkey*. London: Routledge.
- Kadioglu, Ayşe. 2010. "The Pathologies of Turkish Republican Laicism." *Philosophy & Social Criticism* 36 (No.3-4): -.
- Kalaycıoğlu, Ersin. 2008. "Attitudinal Orientation to Party Organizations in Turkey in the 2000." *Turkish Studies* 9 (No.2): 297-316.
- Karabelias, Gerassimos. 2008. "Dictating the Upper Tide: Civil-Military Relations in the Post-Özal Decade." *Turkish Studies* 9 (No.3): 457-473.
- Karpat, Kemal H. 2001. *The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State*. Oxford: Oxford University Press.
- Keyman, E. Fuat dan Berrin Koyuncu. 2005. "Globalization, Alternative Modernities and the Political Economy of Turkey." *Review of International Political Economy* 12 (No.1): 105-128.
- Koşacıoğlu, Dicle. 2004. "The Tradition Effect: Framing Honor Crimes in Turkey." *Differences* 15 (No.2): 118-151.
- Köker, Levent. 2010. "Turkey's Political-Constitutional Crisis: An Assessment of The Role of the Constitutional Court." *Constellations* 17 (No.2): 328-344.
- Kosebalaban, Hasan. 2007. "The Permanent "Other"? Turkey and the Question of European Identity." *Mediterranean Quarterly* 18 (No. 4), 87-111.
- Kuru, Ahmet T. 2007. "Changing Perspectives on Islamism and Secularism in Turkey: The Gülen Movement and The JDP." dalam *Muslim World in Transition: Contribution of the Gulen Movement*. Ihsan Yilmaz, et.al. (Ed.). London: Leeds Metropolitan University Press.

- _____. 2013. Muslim Politics Without an "Islamic" State: Can Turkey's Justice and Development Party be a Model for Arab Islamists? Policy Briefings. Brookings Doha Center.
- Mardin, Serif. 1989. *Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediuzzaman Said Nursi*. New York: SUNY Press.
- _____. 2005. *The Nature of Nation in the Late Ottoman Empire*, Leiden: ISIM.
- Onar, Nora. 2014. "Symbologies, Technologies, and Identities: Critical Junctures Theory and the Multi-Layered Nation-State." *International Journal of Intercultural Relations* 43 (Part A): 2-12.
- Öniş, Ziya dan Umut Türem. 2002. "Entrepreneurs, Democracy and Citizenship in Turkey." *Comparative Politics* 34 (No.4): 439-456.
- Ozman, Aylin. 2010. "The Image of "Woman" in Turkish Political and Social Thought: On the Implications of Social Constructionism and Biological Essentialism." *Turkish Studies* 11 (No.3): 445-464.
- Park, Bill. 2005. *Turkey's Policy Towards Northern Iraq: Problems and Perspectives*. London: Taylor and Francis.
- Platzdasch, Bernhard. 2009. *Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy*. Singapore: ISEAS.
- Sakallioglu, Umit Cizre. 1997. "The Anatomy of the Turkish Military's Political Autonomy." *Comparative Politics* 29 (No.2): 157-158.
- Sayari, Sabri dan Alim Hasanov. 2008. "The 2007 Elections and Parliamentary Elites in Turkey: The Emergence of a New Political Class?" *Turkish Studies* 9 (No.2): 345-361.
- Ülker, Erol. 2005. "Contextualising "Turkification": Nation-Building in the Late Ottoman." *Nations and Nationalism* 11 (No.4): 613-636.
- West II, W. Jefferson. 2005. "Regional Cleavages in Turkish Politics: An Electoral Geography of the 1999 and 2002 National Election." *Political Geography* 24 (No. 4): 499-532.
- Wuthrich, F. Michael. 2010. "Commercial Media, the Military, and Society in Turkey during Failed and Successful Interventions." *Turkish Studies* 11 (No. 2): 217-34.
- Yavuz, Hakan dan John L. Esposito. 2003. *Turkish Islam and the Secular State: The Gülen Movement*. New York: Syracuse University Press.

- Yilmaz, Ihsan. 2002. "Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish Islamic Law." *Middle East Journal* 56 (No.1): 113-131.
- _____. 2005. "State, Law, Civil Society and Islam in Contemporary Turkey." *The Muslim World* 95 (No.3): 385-411.
- _____. 2011. "Beyond Post-Islamism: Transformation of Turkish Islamism Toward 'Civil Islam' and Its Potential Influence in the Muslim World." *European Journal of Economic and Political Studies* 4 (No.1): 2011.
- _____. 2012. "Towards a Muslim Secularism? An Islamic 'Twin Tolerations' Understanding of Religion in the Public Sphere." *Turkish Journal of Politics* 3 (No.2): 41-52.